

MUHAMMADIYAH AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMS: HABITUS, MODALITY AND ARENA

AZAKI KHOIRUDIN*

ABSTRACT

The study sheds light on community development programs conducted by Muhammadiyah. Through practical Social Theory by Pierre Bourdieu, this study finds some points: first, the reasons of Muhammadiyah's community development programs. Second, the models of Muhammadiyah's community development programs. It finds that the programs are conducted due to al-Ma'un theological perspective coined KH. Ahmad Dahlan which is described by Moeslim Abdurrahman as "Transformative Islam" that fights for the weak people. This social theology then leads to social conducted by Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM)/Community Development Assembly to combat poverty in the 21st century.

KEY WORDS: Muhammadiyah, al-ma'un theology, Moeslim Abdurrahman, Transformative Islam, community development

MUHAMMADIYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: HABITUS, MODAL, DAN ARENA

ABSTRAK

Artikel ini akan mengulas paradigma dari praktik gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dengan menggunakan pendekatan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, studi kualitatif ini akan mengemukakan beberapa hal: *pertama*, apa yang mendorong lahirnya gerakan pemberdayaan masyarakat dalam Muhammadiyah. *Kedua*, bagaimana model praksis pemberdayaan masyarakat ini dilakukan Muhammadiyah. Penelitian ini menemukan bahwa praksis pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah didorong oleh teologi Alma'un (ajaran) pendiri gerakan ini yaitu KH. Ahmad Dahlan, yang direinterpretasi oleh Moeslim Abdurrahman menjadi "Islam Transformatif" sebagai paradigm Islam yang memihak kepada kaum lemah. Teologi sosial ini kemudian melahirkan praksisme sosial yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) untuk menggempur kemiskinan gaya baru di abad ke-21

KATA KUNCI: Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un, Moeslim Abdurrahman, Islam transformatif, pemberdayaan masyarakat.

*) Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Email: azakikhoirudin@gmail.com

* Naskah diterima September 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. Pendahuluan

Studi ini akan mengkaji gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidaklah sebagai gerakan sosial murni akan tetapi gerakan sosial yang bertautan dengan Islam yang menjadikan Islam sebagai solusi atas persoalan sosial dan kehidupan.¹ Pasca seabad usia gerakan sosial-keagamaan ini, mulai merengkuh wilayah baru gerakan tajdid di bidang pemberdayaan masyarakat. Hipotesis yang diajukan di sini adalah bahwa etos al-Maun dari KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, setelah seabad berselang telah diinterpretasi ulang oleh generasi selanjutnya, yaitu Moeslim Abdurrahman dengan gagasan Islam transformatifnya. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) yang fokus menangani masyarakat mustadzafin baru, sehingga Muhammadiyah sudah mulai akrab dengan para petani, nelayan, peternak, buruh, kaum miskin kota, kaum difabel.

Berdasarkan studi Deni Syahputra “Dakwah Transformatif (Studi Pemikiran Moeslim Abdurrahman)” (2016), kemunculan Islam transformatif Moeslim Abdurrahman sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori pembangunan dengan basis Islam dan dakwah.² Di samping itu, Islam Transformatif juga merupakan bentuk kesadaran dan refleksi langsung kegiatan sosial oleh masyarakat, terutama kaum marjinal. Sebagaimana penelitian Fauzan Budi Raharjo berjudul “Islam Transformatif Dalam Pandangan Moeslim Abdurrahman” (2015) bahwa konsep Islam Transformatif Moeslim merupakan sebuah ajakan korektif kembali terhadap ajaran agama dan mengubah arah kajian Islam yang memiliki ranah teologis dunia-akhirat menuju arah yang progresif, yaitu peduli terhadap problematika sosial.³

Mutthoharoh berjudul “Teologi Islam Transformatif Moeslim Abdurrahman dan Relevansinya terhadap Pemikiran Keagamaan Di

Era Kontemporer” (2013) menyatakan teologi Islam transformatif merupakan sebuah pencarian dialogis antara teks dan konteks, yaitu bagaimana agama harus membaca dan memberi jawaban terhadap ketimpangan sosial yang ada.⁴ Sebagaimana dinyatakan Zuly Qodir dalam “Kalibokong Theology” And Moeslim Abdurrahman’s *Transformative Islamic Education*. Moeslim Abdurrahman memahami teks suci al-Qur’an dalam kaitannya dengan perspektif teologi kaum mustad’afin, menghadirkan teks suci Al-Qur’an dalam kondisi kekinian yang penuh dengan hegemoni kapitalisme sosial dan kapitalisme ekonomi sebagai bentuk kemungkaran sosial atau syirik sosial.⁵

Beberapa studi di atas, baik Deni Syahputra, Fauzan Budi Raharjo, Mutthoharoh, maupun Zuly Qodir, masih berkuat pada wacana Islam transformatif dan Moeslim Abdurrahman. Belum ada yang mengulas bagaimana dimensi praksis dari teologi neo-al-Ma’un (Islam transformatif) yang digagas oleh Moeslim Abdurrahman menjadi sebuah model praksis gerakan pemihakan kaum lemah. Bahwa sejak tahun 2000, Moeslim Abdurrahman telah memelopori Lembaga Buruh Tani dan Nelayan (LBTN). Setelah 5 tahun berjalan, pada tahun 2005, diubah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dimana dalam struktur Muhammadiyah, istilah Majelis lebih tinggi daripada sebuah lembaga. Karena itu, tak kalah penting dikemukakan di sini adalah skripsi Sawaluddin Eka Saputra yang berjudul “Institusionalisasi Gagasan Islam Transformatif Moeslim Abdurrahman dalam Pendidikan Islam”. Eka memotret bagaimana Islam Transformatif menginspirasi kehadiran Trisula Baru dalam Muhammadiyah yaitu LazisMu,, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB).⁶

Artikel ini akan lebih spesifik melihat keterkaitan antara gagasan Moeslim Abdurrahman, Islam transformatif dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Apa yang

¹ Abdul Mu’ti. “Muhammadiyah Gerakan Civil Society yang Mandiri, Tidak Anti Pemerintah.” *Media Maarif* Vol 4, no. 2 (2009)

² Deni Syahputra. “Dakwah Transformatif (Studi Pemikiran Moeslim Abdurrahman).” *Penelitian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung*, 2016.

³ Fauzan Budi Raharjo. “Islam Transformatif Dalam Pandangan Moeslim Abdurrahman.” *Penelitian Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*, 2015.

⁴ Mutthoharoh. “Teologi Islam Transformatif Di Era Kontemporer.” *Penelitian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2013.

⁵ Zuly Qodir. “Kalibokong Theology And Moeslim Abdurrahman’s Transformative Islamic Education.” *Jurnal Iseedu* Volume. 1, no. 1 (2017).

⁶ Sawaluddin Eka Saputra. “Institusionalisasi Gagasan Islam Transformatif dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Iseedu* Volume. 1, no. 1 (2017).

mendorong lahirnya gerakan pemberdayaan Muhammadiyah? Etos dan ide apa yang mendasarinya? Lalu, bagaimana model praksis gerakan pemberdayaan Muhammadiyah?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus studi ini pada gerakan pemberdayaan Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) yang digerakkan oleh teologi Alma'un KH. Ahmad Dahlan. Dengan menggunakan rumus Piere Bourdieu tentang praktik sosial, yakni "(habitus x modal) + arena= praktik",⁷ dengan memodifikasi kreatif-imajinatif hubungan pilar triadik = (*knowledge x person*) + *institution*. Salah satu aspek dalam *habitus*, perpektif Bourdieu, merupakan seperangkat pengetahuan. Dalam kaitan penelitian ini yang dimaksud adalah cara pandang terhadap dunia (*worldview*), kepercayaan, dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari Kiai Dahlan. Selanjutnya, pengetahuan, dalam penelitian ini yang spesifik membahas "teologi Alma'un" ini dibentuk oleh *habitus* daripada direkam oleh memori. Kemudian diinterpretasi ulang oleh generasi pelanjutnya yaitu Moeslim Abdurrahman menjadi sebuah teologi sosial yang dikenal dengan "teologi transformatif atau "Islam transformatif" setelah seabad berselang, sehingga akhirnya melahirkan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam Muhammadiyah.⁸

Adapun mengenai prinsip "modal" Bourdieu merupakan hubungan sosial. Salah satu modal yang digunakan yang jadi pertarungan dalam arena adalah modal budaya, modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik. Termasuk modal budaya adalah bakat yang dibawa sejak lahir, cara berbicara, cara pembawaan, tata krama, dan sebagainya. Waryani mengkonseptualisasikan pilar modal ala Bourdieu menjadi pilar *person*, sedangkan *arena* Bourdieu sebagai *field* (lapangan). Menariknya, Bourdieu membagi arena menjadi dua, yaitu arena produksi terbatas (*field of restricted production*) dan arena produksi skala besar (*field of large-scale production*). Kemudian Waryani membagi konsep *field*-nya Bourdieu dengan istilah

little field (*litle community*) dan *great field* (*global community*).⁹ Dengan meminjam Bourdieu, *little field* penulis pahami sebagai organisasi Muhammadiyah, dan *great field*-nya berhubungan dengan organisasi-organisasi (baca: umat Islam) lain, termasuk bangsa dan dunia internasional.

Rumusan generatif "(*habitus x modal*) + arena= praktik" Bourdieurian di atas adalah dalam rangka mengajukan sebuah pendekatan dalam memahami realitas sosial Muhammadiyah secara dialektis. Pendekatan yang mencoba keluar dari subjektivisme dan objektivisme. Kemudian penulis merumuskan sebagaimana tabel berikut:

Pierre Bourdieu	Modal x Ahmad Dahlan	<i>Habitus +</i> Teologi Alma'un	Arena = Muhammadiyah	Praktis Pemberdayaan Masyarakat
	Moeslim Abdurrahman	Islam Transformatif		

Sehingga tulisan ini mengintegrasikan dan menginterkoneksi antara Kiai Ahmad Dahlan dan Moelim Abdurrahman (*person*), Muhammadiyah (*institution*), dan teologi Alma'un dan Islam Transformatif (*knowledge*). Dimana modal, *habitus*, dan arena ini yang mendorong lahirnya gerakan pemberdayaan Muhammadiyah.

Untuk melihat proses institusionalisasi gagasan Islam Transformatif Moeslim Abdurrahman dalam Muhammadiyah, maka penelitian ini meminjam pendekatan Berger dan Luckmann, rumusan konseptual tentang dimensi sosial pengetahuan yang berkembang di masyarakat berawal dari proses eksternalisasi (*externalization*) kemudian beranjak ke dalam proses obyektivikasi (*objectication*) dan berakhir menuju proses internalisasi (*internalization*).¹⁰ Dalam penelitian ini eksternalisasi digunakan untuk melihat proses masuknya rezim intelektual atau diskursus yang terjadi pada Moeslim Abdurrahman, sehingga mempengaruhi orientasi dan gagasan Islam transformatif. Selanjutnya, obyektivikasi adalah proses produksi pengetahuan Moeslim yang di sini terjadi penandaan. Proses penandaan ini merupakan proses habitualisasi kolektif masyarakat yang

⁷ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique og The Judgment of Taste*, terj. Ricard Nice (UK: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1984), 101.

⁸Jen Webb, Tony Schirato, and Geof Danaher, *Understanding Bourdieu* (London: SAGE Ppublication, 2002), 38-42.

⁹ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Birografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...) Person, Knowledge, and Institution* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 78.

¹⁰*Ibid*, 52.

terinstitusionalisasi melalui proses pengulangan. Proses ini kemudian dipahami sebagai tahap terinstitusionalisasi gagasan atau konsep Moeslim dalam Muhammadiyah. Sementara, internalisasi merupakan pemahaman subyektif dan sekaligus penangkapan atas dunia sebagai sesuatu yang bermakna dan sekaligus sebagai realitas sosial. Segudang wacana dalam diri Moeslim dan pemahaman individu yang disosialisasikan melalui proses habitualisasi, yang termodifikasi secara kreatif, di sinilah terjadi internalisasi aktivis-aktivis Muhammadiyah, yang kemudian akan berputar lagi mengalami eksternalisasi menjadi sebuah lembaga yang disebut MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat).

C. KERANGKA TEORI

Sebenarnya, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”¹¹. Konsep ini lebih luas, tak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safetynet*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife menyatakan bahwa:

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in

political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on.¹²

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menurut Ife tersebut sebagai upaya pemberian otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu komunitas, serta mendorong mereka agar kreatif dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Lahirnya konsep pemberdayaan merupakan antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Menurut Prijono dan Pranarka, konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut : 1) proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggir; 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan 4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.¹³ Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Dilihat dari proses operasionalisasinya, menurut Sumodiningrat, ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai

¹¹ R. Chambers, “Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?”, dalam G. Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Cides, 1996); juga G. Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat* (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1996).

¹² J.W. Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice* (Longman, Australia, 1995).

¹³ O.S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies, 1996).

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.¹⁴

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah

menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Jika menurut Ife, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung, maka pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Secara sederhana, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

D. PEMBAHASAN

Sejatinya watak dasar Muhammadiyah adalah pemberdayaan dan pelayanan sosial. Dalam konteks sejarah, Muhammadiyah generasi awal era Kiai Dahlan banyak memelopori usaha-usaha pembinaan komunitas atau jamaah di masyarakat. Pendiri Muhammadiyah tersebut membentuk dan membina kelompok pengajian seperti Wal-Ashri, Fathul Asrar Miftahu Sa'adah, Nurul Iman, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan berdirinya Qismul Arqa kelompok putra-putri yang dibina di rumah atau asramanya, yang menjadi embrio lahirnya Madrasah Mu'allimin

¹⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999).

dan Mu'allimat Yogyakarta. Kiai dan sahabat-sahabat terdekatnya juga membina kependuan, yang melahirkan Hizbul Wathan tahun 1918. Pemberdayaan perempuan melalui Sopotresno sebagai embrio Aisyiyah tahun 1917. Juga pembinaan Siswa Praja sebagai embrio Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1961.¹⁵

Kiai Dahlan melalui gerakan al-Ma'un mengumpulkan anak-anak yatim yang kemudian dilembagakan menjadi *Weeshuis* (Rumah Yatim), *Armeinhuis* (Rumah Miskin), dan Poliklinik sebagai benih lahirnya Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) atau kini dikenal sebagai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah tersebut juga bergaul dengan kelompok elite di Boedi Oetomo, mengajar di Sekolah Praja, dan berinteraksi dengan siapa saja yang ditemuinya untuk berdialog dan mendakwahkan Islam. Di kediaman HOS Tjokroaminoto Kiai Dahlan juga memberikan pengajian keislaman di hadapan Soekarno, Semaun, dan elite muda pergerakan yang haus ilmu dan keislaman. Perintisan awal Muhammadiyah tersebut menunjukkan usaha-usaha langsung membina kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat, yang saat ini dikenal sebagai komunitas atau jamaah.¹⁶

Majelis paling awal dibentuk oleh Muhammadiyah adalah Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) di samping Majelis Tabligh, Majelis Pengajaran, dan Majelis Pustaka. Aksi-aksi yang dilakukan Muhammadiyah melalui Majelis ini cukup mengesankan. Muhammadiyah seperti membentuk rumah miskin, menyantuni yatim-piatu, menampung dan melatih tenaga kerja urban, memberikan penolongan kepada korban bencana alam, memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis. Aksi-aksi pelayanannya sungguh mengesankan adalah ketika dokter Soetomo, menjuluki Muhammadiyah sebagai agama welas asih. Etika welas asih yang dilakukan Muhammadiyah konon bersumber dari spirit al-Ma'un, bahkan spirit al-Ma'un (pemberdayaan) inilah yang telah menjadikan Muhammadiyah terus bergerak sampai sekarang ini.¹⁷

Al-Ma'un menjadi basis ideologis-teologis

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas*, (Yogyakarta: PPM, 2015), 5.

¹⁶ *Ibid.*...,5.

dalam perjuangan Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah merumuskan landasan normatif teologi al-Ma'un menjadi *Fikih al-Ma'un* yang lebih operasional. Fikih al-Ma'un sebagai pelengkap sistem gerakan Muhammadiyah untuk menguatkan komitmen dakwah advokatif. Gerakan dakwah advokatif melalui pemberdayaan masyarakat, sedikit banyak telah mengubah wajah Muhammadiyah. Banyak kalangan menilai dakwah Muhammadiyah cenderung elitis bergeser menjadi lebih populis. Kalau selama ini upaya pemberdayaan yang dilakukan Muhammadiyah lebih banyak terjadi di seputaran amal usaha, saat ini pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program aksi yang langsung menyentuh persoalan riil masyarakat miskin dan marginal yang direpresentasikan oleh para petani, nelayan, peternak, buruh, kaum miskin kota, dan kaum difabel.¹⁸

1. Genealogi Intelektual Moeslim Abdurrahman

Moeslim Abdurrahman, di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah akrab disapa kang Moeslim. Moeslim merupakan putra kelahiran kota Lamongan, Jawa Timur, 8 Agustus 1948 dari keluarga petani Muhammadiyah. Di dalam keluarganya masih mengalir darah priyayi, seniman dan kebanyakan terdidik dalam lingkungan pesantren. Maka, tidak heran jika obsesi dalam keluarganya selalu ingin setiap anaknya mondok di pesantren, kemudian pulang kampung dan minimal menjadi Kiai kecil di pedesaan.¹⁹

Berbeda dengan anak-anak di masanya yang dari kalangan santri, ketika itu mereka memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren atau madrasah, Moeslim kecil dengan latar belakang keluarga petani santri atau Masyumi pergi ke Sekolah Rakyat (SR) yang di situ memiliki guru rata-rata condong berideologi PKI (Partai Komunis Indonesia). Setamat dari SR di

¹⁷ Bachtiar Dwi Kurniawan, "Pemberdayaan Masyarakat: Jalan Dakwah Muhammadiyah di Akar Rumput" dalam *Pelajar Bergerak Menuju Indonesia Berkemajuan* (Jakarta: Al-Wasat, 2014).

¹⁸ Laporan Majelis dan Lembaga serta Organisasi Otonom Pimpinan Pusat Muhammadiyah disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2009 (Bandar Lampung, 5-8 Maret 2009), 133.

¹⁹ <http://islamlab.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2018).

pertengahan tahun 1960-an, dia melanjutkan studi mondok di Pesantren Roudhotul 'Ilmiyyah Kertosono Jawa Timur yang diasuh salah satu generasi pertama murid Kiai Hasyim Asy'ari (Pendiri NU) bernama Kiai Salim Akhyar. Beliau selama menuntut ilmu di Makkah bersentuhan dengan Wahabisme, sehingga memilih haluan purifikasi yang ketat. Pola pendidikan yang demikian turut membentuk cara keberagamaan Moeslim muda yang cenderung keras dalam menyikapi problematika khilafiyah.²⁰

Masa-masa nyantri, masa dimana kaum muslimin baru melakukan penumpasan komunis, termasuk Moeslim terlibat secara fisik.²¹ Ketika di pesantren Moeslim tekun mengkaji kitab (takhasus kitab-kitab tafsir Baidhawi dan Bidayatul Mujtahid) sebagai bekal menjadi kyai di desanya jika pulang nanti. Namun, Moeslim juga sedang merasa gundah dengan permasalahan sulit yang dialaminya ketika itu dan hal tersebut tertuang dalam salah satu tulisan bukunya (sebutan nama Moeslim adalah Kang Thowil):

“Rasa gundah yang membuat Kang Thowil menghadapi pilihan sulit: apakah ia akan kembali ke desanya setelah menyelesaikan takhasus kitab-kitab tafsir Baidhawi dan Bidayatul Mujtahid, untuk menjadi kyai petani, ataukah ikut melompat masuk fakultas adab universitas di pesantrennya”.²²

Keluarganya memang sering titip untuk membeli kitab-kitab agama pada mereka yang naik haji (masyarakat di desanya), karena waktu itu membeli kitab sangat sulit. Ketika itu juga, orang tua di rumahnya telah mendirikan madrasah dari bahan-bahan pohon kelapa untuk dikelolanya setamat mondok di pesantren.

Pada saat yang bersamaan, madrasah yang didirikan ambruk ditiup angin. Ketika itu nuansa konflik orang-orang di dua ormas besar NU-Muhammadiyah mencuat ke permukaan. Pasca kejadian itu juga muncul beragam penafsiran. Orang-orang NU sangat senang dengan kejadian itu, mereka menafsirkan bahwa madrasah yang didirikan kelompok Islam sesat, tidak akan diridloi Allah. Sementara itu, tentu Bapak Moeslim yang orang Muhammadiyah menafsirkan kalau

kejadian tersebut hanya sebuah ujian dari Allah, ditambah ungkapan apakah bisa bertahan di jalan yang benar. Kampanye ini juga dilakukan dengan tujuan meyakinkan orang-orang sekitar.²³

Sekilas, di usia Moeslim yang relatif muda, sekitar usia 19 tahunan. Ia berkesempatan naik haji tepat tahun 1965. Tidak lama menjelang G 30 S PKI meletus. Kesempatan itu didapatkan karena harus menggantikan jatah kakeknya yang sudah lansia. Sejak itu ia mangkir di kehidupan pesantren dan tinggal di kampung untuk mengurus administrasi haji di kabupaten.²⁴ Dari pengalaman perjalanan hajinya yang pertama ini, pengalaman hajinya yang kedua tahun 1988 justru jauh berbeda menurutnya:

“Pada tahun 1988, saya berkesempatan menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Pengalaman saya ini benar-benar berbeda dari ibadah haji saya tahun 1965, pada masa Orde Lama. Saat itu, umat Muslim yang pergi naik haji berbeda dengan mereka yang sekarang menunaikan ibadah yang sama. Tidak seperti haji modern, jemaah 1965 tidak disediakan pesawat terbang atau hotel; mereka harus naik kapal laut ke Mekkah. Di samping itu, jemaah haji dari dua masa ini berasal dari latar belakang sosial yang berbeda yang sama sekali bertentangan. Pada masa perjalanan haji menggunakan kapal laut, mayoritas umat Muslim yang menunaikan ibadah haji terdiri dari kaum tani. Jumlah jemaah yang terdiri kaum profesional perkotaan yang kaya, terutama dari kalangan pejabat tinggi pemerintah, dapat dihitung dengan jari. Umat Muslim yang mendominasi perjalanan haji di masa Orde Lama biasanya datang dari daerah yang, oleh Clifford Geertz dalam bukunya *The Religion of Java*, digambarkan sebagai komunitas *santri*”.²⁵

Adapun pengalaman haji pertama yang tidak pernah terlupakan baginya adalah apa yang ia katakan berikut,

“Pengalaman tak terlupakan pada saat saya pertama kali menunaikan ibadah haji adalah ketika rombongan saya melakukan ziarah ke gua Hira, tempat Muhammad menerima ayat Al-Qur'an yang pertama. *Mutawwif* Arab memberi

²³ <http://islamlib.com/gagasan/pegulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2003).

²⁴ Moeslim Abdurrahman, *Kang Thowil dan Siti Marginal*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 56-65.

²⁵ Moeslim Abdurrahman, *Bersujud Di Baitullah: ibadah haji, mencari kesalehan hidup*. (Jakarta: Kompas, 2009), 71.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Moeslim Abdurrahman, *Kang Thowil dan Siti Marginal*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 3.

²² *Ibid*, 4.

penjelasan dan merekonstruksi bagaimana Muhammad menerima wahyu dari jibril. Karena sebagian besar penjelasan yang diberikan oleh *mutawwif* menggunakan bahasa Arab, para jemaah yang berasal dari desa menganggapnya sedang memimpin doa. Akibatnya mereka semua menanggapinya dengan 'amin, amin, amin'".²⁶

Selanjutnya, Moeslim sempat optimistis bagaimana menjadi seorang mahasiswa. Karena di zamannya masih belum banyak kaum santri yang kuliah di universitas, kalau bukan anak dari kaum saudagar muslim. Waktu itu Moeslim melihat mahasiswa UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta memakai jaket UII, anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) memakai jaket HMI. Berkat simbol-simbol tersebut yang memiliki arti kebanggaan tersendiri, juga mereka musuh-musuh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang membuatnya lebih optimis lagi. Di samping itu juga banyak teman-temannya yang telah mendaftar di universitas.²⁷

Menjelang tahun 1970-an Moeslim memasuki perguruan tinggi di Fakultas Tarbiyah (saat ini berubah nama menjadi program Studi Pendidikan Agama Islam) di IAIM (Institut Agama Islam Muhammadiyah) Surakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semasa mahasiswa menjadi aktivis HMI cabang Solo yang mengembangkan pemahaman progresif-kosmopolitan. Pergumulan di HMI inilah yang pada urutannya menggeser pola pemahaman pemurnian ke arah kosmopolitanisme Islam.²⁸

Ditemukan dua data berbeda tentang tempat kuliah Moeslim, *pertama* masuk di Fakultas Ilmu Agama, Jurusan Tarbiyah yang didirikan Muhammadiyah di Kediri.²⁹ *Kedua* ia masuk di Fakultas Tarbiyah, Institiut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM), Solo. Titik terangnya adalah Bapak Agus Sumiyanto selaku adik kelas langsung dari Moeslim pada masa kuliahnya. Ia menyampaikan ketidaktahuannya tentang tempat kuliah Moeslim di Universitas Muhammadiyah

Kediri, tetapi ia menyampaikan kalau Moeslim pernah kuliah di Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Kottabarat serta Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surakarta, yang telah menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).³⁰

Moeslim sendiri aktif di berbagai gerakan kemasyarakatan atau LSM, keaktifannya dimulai ketika mengikuti pergerakan mahasiswa Islam, yaitu HMI Cabang Solo. Ia pernah menjadi ketua. Di HMI ini ia mengalami pergulatan.³¹ Ia merasa sebagai subkultur masyarakat pedesaan yang agraris dengan pencarian agama yang lebih menguatkan iman serta spiritualitas otentik dan sedikit bersentuhan dengan akal pikiran, tidak ada yang namanya pemikiran Islam lain. Berbeda ketika menjadi mahasiswa yang tergabung dalam aktivis HMI, ia menemukan pengalaman Islam lain dan agak akademik.³²

Semasa ujian akhir perkuliahan Moeslim untuk mendapat titel sarjana muda, Moeslim diwajibkan untuk menyeter ijazah SLTA. Moeslim sendiri mengikuti ujian persamaan Aliyah supaya bisa ikut ujian BA (sarjana muda). Perasaan berbeda muncul pada diri Moeslim terhadap teman-temannya yang dari pesantren. Sebab, ia telah memiliki gelar akademik, gelar yang langka dan sudah menjadi status sosial tersendiri di lingkungannya.³³

Pergulatan itu semakin menjadi, ketika pandangannya yang normatif berubah ke empiris semakin kental saat ia diterima di Pusat Penelitian Ilmu Sosial selama setahun (tahun 1975) di bawah naungan Dr. Alfian almarhum dari LIPI dan menjadi pegawai negeri di Badan Litbang Departemen Agama dari tahun 1977 sampai 1990.³⁴ Pergulatan-pergulatan semacam itu yang merubah pemikiran Moeslim kepada jalur transformasi berpikir secara multitafsir sebagai sebuah sikap terhadap perubahan sosial yang terjadi. Seperti apa yang pernah ia ungkapkan:

"Amat mengherankan, belakangan, saya

²⁶ *Ibid*, 81.

²⁷ <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2003).

²⁸ Moeslim Abdurrahman, *Kang Thowil dan Siti Marginal* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 17-18.

²⁹ <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2003).

³⁰ Hasil wawancara bersama bapak Agus Sumiyanto & Azaki Khoirudin di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, UMS, tanggal 15/5/18, pukul 21.30 WIB.

³¹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Yang Memihak* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 209.

³² *Ibid*.

³³ <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2003).

³⁴ Moeslim Abdurrahman, *Islam Yang Memihak* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 209.

mulai merasakan kejadian itu sebagai perbaikan moral dan intelektual atas pemahaman saya mengenai 'Islam Transformatif'. Soalnya, selama beberapa waktu, bagi saya, hal itu tidak berarti melihat kaum miskin sebagai individu yang harus diberikan sedekah supaya si pemberi mendapatkan balasan dari Tuhan. Hal tersebut justru lebih menandakan perjuangan Islam berdasarkan kepentingan dalam sistem politik yang bersifat adil. Berbeda dari ajaran Islam tradisional, saya menyokong filosofi tersebut melalui slogan 'teologi Islam untuk transformasi,' yang memandang kaum miskin sebagai golongan sosial dalam analisis sosial".³⁵

Berkat hal itu, tidak ada alasan serasional apapun bagi seorang Moeslim untuk tidak memberi, seolah-olah imannya tergoncang dan takut jika tidak memberi sesuatu kepada kaum marjinal. Moeslim juga menekankannya pada setiap sesi perkuliahan atau pendidikannya, terutama kepada anak-anak muda Muhammadiyah didikannya dengan berbicara bahwa Islam adalah agama untuk keadilan sosial. Karena menurut Moeslim, kalau di hadapan mata kita terdapat banyak orang yang kelaparan atau menderita, hal ini sudah merupakan peringatan bagi kaum Muslim untuk membangun solidaritas yang memihak nasib mereka.³⁶

Demikian sejumlah organisasi yang didirikan dan diprakarsai Moeslim dan teman selama hidupnya, semua bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Beberapa dari organisasi itu adalah LP3ES, P3M, LSP, Maarif Institute, PSAP, al-Maun Foundation, dan JIMM. Advokasi Moeslim untuk pemuda dan tertindas atau marjinal (mustad'afin) cukup diakui. Ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Pekerja, Petani dan Komunitas Perikanan (LPBTN) dari Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Din Syamsuddin, di 2005-2010. Setelah itu LPBTN diubah menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (Majelis Pemberdayaan Masyarakat/MPM) yang dipimpin Said Tuhuleley untuk 2010-2021 tetapi ia meninggal di tengah tugasnya dan digantikan oleh Mohammad Yamin hingga saat ini.³⁷ Hari-hari Moeslim memang diabdikan

³⁵ Moeslim Abdurrahman., *Bersujud di Baitullah: ibadah haji, mencari kesalehan hidup*. (Jakarta: Kompas, 2009), 85.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Zuly Qodir. "Kalibokong Theology And Moeslim Abdurrahman's Transformative Islamic Education." *Jurnal Iseedu* Volume 1, no. 1 (2017).

untuk membina dan mengembangkan LSM bentukannya. Hingga akhirnya, Moeslim meninggal dunia pada Jumat malam, 6 Juli 2012 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.³⁸

Moeslim Abdurrahman dikenal sebagai sosok intelektual muslim di eranya dan memiliki banyak pengalaman serta kontribusi dalam pendidikan berbasis kemasyarakatan (LSM), tentunya juga memiliki segudang konsep gagasan pemikiran terhadap persoalan-persoalan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Moeslim menuangkan gagasan tersebut berbentuk karya berupa tulisan yang diterbitkan di berbagai media lokal maupun nasional dan ada juga yang telah menjadi buku. Dalam beberapa buku karya yang penulis kumpulkan dan simpulkan berdasarkan urutan tahun terbit, yaitu: (1) "*Kang Moeslim dan Siti Marginal*" diterbitkan Pustaka Firdaus tahun 1995; (2) "*Islam Transformatif*" Pustaka Firdaus tahun 1995; (3) "*Semarak Islam, Semarak Demokrasi*" (Pustaka Firdaus, 1996); (4) "*Islam sebagai Kritik Sosial*" (Erlangga, 2003); (5) "*Islam Yang Memihak*" (Pustaka Pesantren, 2015); (6) "*Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan*" (Penerbit Kanisius, 2009); (7) "*Bersujud di Baitullah: Ibadah Haji, Mencari Kesalehan Hidup*" (Kompas, 2009)

2. Islam Transformatif: Teologi Sosial Neo-Al-Maun

Dalam sosiologi, agama selain berfungsi legitimatif, juga berfungsi kontrol secara kritis, jika agama mampu independen dari struktur yang mungkin menjeratnya. Perlu kita sadari bahwa setiap fase perkembangan sosial, kemungkinan lahirnya struktur yang menjebak agama itu tetap ada, kendati mulanya agama menjadi pemrakarsa perubahan masyarakat. Pemimpin agama dengan keberanian, berhasil melakukan perubahan masyarakat dengan menawarkan tema-tema moral-etis dan konsolidasi spiritual, tetapi proses berikutnya cenderung terjebak sendiri dalam rutinitas karismanya saja, tatkala ia melihat perlunya mengambil langkah-langkah stabilisasi atau pembirokratisasi. Sebab, ide-ide keagamaan yang ideal harus diterjemahkan dalam bentuk kehidupan praksis sambil memperhitungkan segala tradisi atau kapasitas formal yang ada dalam masyarakat.³⁹

³⁸ Mutthoharoh, "Teologi Islam Transformatif Di Era Kontemporer", *Penelitian* Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, 14.

³⁹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 9.

Agama seharusnya selalu berani tampil dalam setiap keadaan, bukan saja untuk menunjukkan hal-hal yang *ma'ruf* (positif), tetapi juga hal yang munkar (teologi negatif). Mekanisme kritis agama terhadap perubahan, dalam Islam sangat ditekankan. Dalam tradisi Islam, teologi negatif sebenarnya berarti harus mempertanyakan dan menunjukkan hal-hal yang tidak benar, bahkan sesuatu yang sifatnya sentral. Pengakuan keislaman melalui pengucapan syahadat, pada dasarnya dimulai dengan pernyataan negatif, dengan menafikan semua dewa yang bukan Tuhan dalam tradisi monotheisme sejati.⁴⁰ Seorang muslim, tidak sampai pada taraf keimanan sejati, sebelum ia mengalami pergulatan dengan dirinya sendiri dengan lingkungan sosial sekitar. Dalam proses seperti itu, kemampuan untuk "*membebaskan*" struktur sangat diperlukan, agar ia dapat berperilaku dengan dasar-dasar moralitas agama yang otentik. Bukan sebaliknya, berperilaku dengan hanya menuruti peranan sosiologisnya atas status yang disandang dalam masyarakat.⁴¹

Menurut Kang Moeslim, agama tetap bisa menumbuhkan mekanisme kritis dalam dinamika agama itu sendiri, baik melalui ijtihad sebagai metode intelektual dalam memahami pesan agama. Ataupun secara langsung, jika agama diharapkan peranannya untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan masyarakat yang aktual. Itu berarti, agama harus selalu berani memberikan kriteria moral pada setiap keadaan, dengan menunjukkan mana keadaan yang diridhai oleh Allah dan mana yang tidak.⁴²Sebenarnya kalau direnung-renungkan, apa yang baik dan apa balasan dari perbuatan baik (teologi positif), itu adalah urusan Tuhan. Akan tetapi, apa yang tidak baik menurut Tuhan, itulah yang oleh-Nya kepada kita untuk memperbaikinya. Adapun, bagaimana cara memperbaiki keadaan itu, menurut Kang Mueslim Tuhan sengaja tidak menunjukkan dengan pasti. Oleh karenanya, adalah tanggungjawab bersama untuk mengkajinya dan menemukan cara yang terbaik. Jalan Tuhan, tampaknya selalu memberikan kemungkinan agar kita mampu menafsirkannya.⁴³

⁴⁰*Ibid*,10.

⁴¹*Ibid*.

⁴²*Ibid*,12.

⁴³*Ibid*.

Dalam konteks yang lebih luas, agama tidak hanya menuntut kepatuhan belaka, tetapi juga pergulatan untuk mewujudkan tatanan yang lebih bertanggung jawab. Seperti halnya pergulatan seorang sufi, yang tak kenal henti menyatu dengan Tuhan (*Al-Haq*), yang biasanya harus dilalui dengan tahapan-tahapan pembebasan (*khalwat*). Itu dilakukan, dengan rasa naif, karena syareat berisi kepatuhan belaka, dan tanpa kebebasan mempertanyakan theis yang sejati itu, maka tidak mungkin orang akan mencapai kerinduan dan kecintaan kepada-Nya. Dalam pergulatan kaum sufi, mereka yakin bahwa emosi Tuhan tidak akan terganggu sedikitpun oleh kebebasan manusia. Perpektif sufi, menurut Kang Mueslim diutarakan dalam rangka membicarakan fungsi kritis terhadap struktur sosiologis agama. Karena, hanya dengan perpektif itulah kita akan dapat memahami pesan suci agama yang relevan dengan keadilan sosial, persamaan derajat, demokrasi, egalitarian. Inilah manifestasi takwa, yang memulangkan seluruh sumber kebenaran dan harkat kemanusiaan di tangan Tuhan, bukan pada otoritas manusia.⁴⁴

Jika kita ingin menyelesaikan persoalan mereka secara mendasar, janganlah memberi ikan, tetapi berilah pancing.⁴⁵ Gerakan memberi kail, bukan ikan, idealnya dilakukan dengan program-program pengembangan masyarakat. Gerakan itu harus bersifat pendampingan, dan penempatan kaum *dhuafa* dan *mustadha'afin* sebagai subyek. Oleh karena itu, pendekatan transformatif menjadi acuan yang sangat penting agar dalam proses itu, mereka lah yang akan melaksanakan program dirinya, memahami strategi dan peluang-peluang yang mungkin dapat meningkatkan harga dan harkatnya sebagai manusia yang mulia di depan Penciptanya.⁴⁶

Transformasi, sepatutnya menjadi gerakan kemanusiaan yang mampu mengantarkan kehidupan sosial yang sederajat di depan Allah SWT. Suatu gerakan transformatif yang menumbuhkan kepedulian terhadap nasib sesama, dan yang melahirkan aksi solidaritas. Yakni bertujuan mempertalikan mitra insani atas dasar kesadaran iman bahwa sejarah suatu kaum hanya akan diubah oleh Tuhan jika ada kehendak

⁴⁴*Ibid*,13.

⁴⁵*Ibid*,39.

⁴⁶*Ibid*,40.

dan upaya dari semua anggota kaum itu sendiri. Transformasi adalah jalan yang paling manusiawi untuk mengubah sejarah kehidupan umat manusia. Sebab dalam proses ini yang berlaku adalah “pendampingan” dan bukan pengarahan, apalagi pemaksaan.

Transformasi, pada dasarnya adalah gerakan kultural yang didasarkan pada liberalisasi, humanisasi, dan transendensi yang bersifat profetik. Yakni, mengubah sejarah kehidupan masyarakat oleh masyarakat sendiri ke arah lebih partisipatif, terbuka, dan emansipatoris. Suatu cita-cita yang melambangkan penjunjangan tinggi harkat dan harga kemanusiaan, keyakinan orang dihargai dan perbedaan pendapat yang menjadi tradisi. Untuk mencapai situasi seperti itu, harus disadari memang tidak gampang. Hal ini harus dimulai oleh siapa saja yang dalam pandangan hidupnya merasa peduli terhadap persoalan ketimpangan sosial sebagai tantangan iman bersama.

Gerakan transformasi sosial bersifat partisipatif dimulai dari organisasi. Gerakan transformatif yang dinamis dari, oleh, dan untuk masyarakat. Transformasi bersifat holistik, yaitu dimensi yang menyeluruh, termasuk transformasi tata nilai, tingkah laku individu, dan struktur kehidupan kolektif masyarakat. Gerakan transformatif harus menciptakan suasana kebersamaan di antara masyarakat itu sendiri dalam membicarakan dan mempersepsi realitas, mencari peluang-peluang di balik realitas dan memutuskan secara bersama-sama bagaimana mengubah realitas itu agar lebih bermakna dilihat dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang sederajat sebagai khalifah Allah swt untuk menciptakan kemakmuran.⁴⁷

Proses transformasi dalam arti menumbuhkan kesadaran bersama masyarakat sejauh mana mereka mampu memahami dirinya sendiri dan memecahkan persoalan. Yang lebih penting ialah secara wajar menumbuhkan kesadaran kelompok dalam bentuk jamaah sosial baru yang terbuka, egalitarian, dan menyejahterakan. Jadi, tidak sekedar kemakmuran semu berupa tumbuhnya pendapatan ekonomi yang bersifat material saja.⁴⁸ Jamaah sosial (baca: komunitas) yang lahir

dengan solidaritas baru yang didasarkan pada kesamaan berusaha, keadilan memperoleh hasil dan keterbukaan dalam kepemimpinan. Tipe jamaah (komunitas) yang lahir di pelbagai tempat sebagai modal organisasi umat yang mengacu pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, beriman, dan bertakwa kepada Allah swt.

Moeslim berpandangan jika psikoanalisis agama bukanlah model yang tepat untuk membaca gagasan wahyu dalam proses sosial. Semisal ada seorang da'i menceritakan kisah Isra' Mi'raj seperti terjadi apa adanya tanpa mengajak para *audience* mengkonfrontasikan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang aktual, pada dasarnya ini merupakan sesuatu *therapeutic* dan bukan hermeneutik⁴⁹. Moeslim bermaksud ingin menggarisbawahi bahwa dalam bertafsir transformatif, prinsip utama yang mendasari bukanlah sub-ordinasi sukarela satu terhadap yang lain, tetapi semua pihak harus memiliki kesetaraan 'resistensi' baik langsung maupun tidak untuk memberikan konstruk yang obyektif.

Oleh karena itu, bertafsir transformatif Moeslim merupakan kegiatan pembacaan wahyu secara bersama-sama dalam suasana dialogis, saling memberi pendapat, kritik dalam rangka merumuskan praksis bersama. Dalam situasi dimana wahyu sebagai teks kehidupan dibawa dalam percaturan umum (*the public sphere*), sudah tentu agar tetap memantulkan hidayah, potensi kreativitas bahkan kontroversi tentang makna di balik gagasan Tuhan dalam teks itu harus dijaga (semata-mata untuk menghindari *taqlid*, yakni sikap 'membeo' sebagai gejala yang paling dasar melawan kebebasan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk kreatif).

Bertafsir transformatif (yang bisa dikatakan sebagai proses refleksi memahami wahyu paling dalam atau *the depth hermeneutics*), memang harus dialogis. Namun agar menghasilkan aksi, tetap dibutuhkan konsensus atau *ijma'*, hanya saja kesadaran palsu dan kesepakatan palsu tidak bisa ditolelir. Di sinilah harus tetap dijaga porsi antara kritik, kesepakatan, dan emansipasi, sebab baik pemahaman kritis dan kesepakatan sebenarnya merupakan kulminasi dari kehidupan sosial umat manusia.

⁴⁷*Ibid*,41.

⁴⁸*Ibid*,42.

⁴⁹Moeslim Abdurrahman, *Semarak Islam Semarak Demokrasi?* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 163.

Bertafsir transformatif, memang tidak boleh berhenti pada keasyikan ‘perbincangan bebas’ itu sendiri. Praksis sebenarnya memiliki lingkup dan lingkaran yang ukurannya disandarkan pada ideologi emansipasi (yang merupakan tema pokok ajaran tauhid itu sendiri). Proyek tafsir transformatif tidak lain merupakan politik opini yang berangkat dari tafsir wahyu untuk memfasilitasi kemampuan umat mendefinisikan keadaan yang dapat disebut adil dan yang tidak adil. Dan bila tidak adil, bagaimana keadaan itu bisa diubah menjadi lebih adil.

3. Majelis Pemberdayaan Masyarakat: Wilayah Baru Praksis Al-Ma’un

Fondasi teologi al-Ma’un yang diletakkan Ahmad Dahlan dalam bentuk Tafsir Amali dianggap oleh warga Muhammadiyah dan juga dinilai banyak peneliti, seperti Deliar Noer (1973) dan A Jainuri (1999), berhasil membawa warga gerakan ini gigih dan bersemangat membebaskan para mustadh’afin dari ketertindasannya. Di abad pertama, wujud konkret dari gerakan ini adalah pendirian beberapa panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah. Pada abad kedua, dalam satu dasawarsa terakhir, sejak Muhammadiyah berada di bawah kepemimpinan prolifrik Din Syamsuddin, organisasi ini sedang membangun tiga ranah pembaruan melengkapi tiga ranah konvensional. Tiga ranah itu adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (LAZISMU), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Dimana tulisan ini hendak fokus pada aktivisme MPM dalam mengawal agenda pencerahan peradaban melalui pemberdayaan kaum marjinal.

Gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui MPM menjadikan surat al-Ma’un (maupun berbagai surat lainnya dalam Al-Qur’an) sebagai basis nilai yang menginspirasi dan menggerakkan aktivismenya. Terutama tiga ayat awal dari surat al-Ma’un memberi inspirasi bagi dikembangkannya berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang *halal* dan *thayyib*. Kalau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin menjadi salah satu indikator

dari para pendusta agama, maka jaminan bagi ketercukupan pangan bagi orang miskin pun menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.⁵⁰ Teologi al-Ma’un dapat menjadi pijakan teologi pembebasan ala Muhammadiyah yang memberdayakan dan memajukan “orang-orang miskin, kaum papa dan terpinggirkan (*mustadh’afin*)”, bahkan kelompok “neo-mustadh’afin”.

Ide gerakan pemberdayaan masyarakat melahirkan sebuah komitmen yang kuat di dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah. Gagasan itu mengalami institusionalisasi di Muhammadiyah sejak Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Untuk merealisasikan ide dan komitmen keberpihakan Muhammadiyah kepada masyarakat yang lemah dan marginal dibentuklah lembaga baru di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan nama Lembaga Buruh Tani dan Nelayan (LBTN PP Muhammadiyah) dengan Surat Keputusan: No. 70/SK-PP/I-A/2.a/2000 yang diketuai oleh Moeslim Abdurrahman. Secara teknis lembaga ini digerakkan oleh aktivis muda potensial untuk menjadi *officer progame* (OP), yaitu Himmatul Hasanah (OP *integrated farming system*) dan Raja Juli Antoni (OP pendidikan dan advokasi). Pada masa awal program diarahkan untuk pengembangan masyarakat berbasis pertanian terpadu dengan pendekatan *qoryah thayyibah* dan pendidikan penyadaran untuk advokasi kaum marjinal.⁵¹

Setelah berproses selama 5 (lima) tahun, berdasar evaluasi dari PP Muhammadiyah setelah mendengarkan masukan dari internal dan dinamika eksternal, maka pada Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang Jawa Timur, Muhammadiyah semakin menguatkan komitmen keberpihakannya tersebut melalui penguatan kelembagaan dari yang berbentuk Lembaga menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah).⁵² Muhammadiyah menilai, gerakan pemberdayaan harus didukung oleh struktur dan infrastruktur yang kuat dan memadai. Perubahan dari lembaga

⁵⁰ Laporan Pertanggung Jawaban Muktamar ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015, 410-411.

⁵¹ Laporan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005, Disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 (Malang, 2005), 111.

⁵² Bachtiar Dwi Kurniawan, “Pemberdayaan Masyarakat: Jalan Dakwah Muhammadiyah di Akar Rumput” dalam *Pelajar Bergerak Menuju Indonesia Berkemajuan* (Jakarta: Al-Wasat, 2014).

ke majelis mengandung konsekuensi bahwa Muhammadiyah harus membentuk Majelis Pemberdayaan Masyarakat tersebut sampai ke tingkat cabang.⁵³

Komitmen Muhammadiyah yang kuat terhadap keperpihakan kepada masyarakat miskin dan marjinal semakin terlihat jelas ketika kita melihat keputusan Muktamar ke-45 Tahun 2005 di Malang. Dalam rencana strategis disebutkan bahwa Muhammadiyah akan mengembangkan dan memperluas basis gerakan Muhammadiyah yang terletak pada pusat "Penolong Kesengsaraan Oemoem". Pada pasal 10 garis besar program tertulis bahwa Muhammadiyah akan meningkatkan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan mereka yang mengalami marginalisasi sosial di perkotaan maupun pedesaan. Bahkan dalam program nasional hasil keputusan Muktamar ke-45 Tahun 2005 di Malang tersebut secara eksplisit menyebutkan tentang pasal program yang memadukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan dakwah yang membawa kemajuan.⁵⁴ Konstruksi dakwah advokatif melalui pemberdayaan masyarakat semakin terlihat jelas ketika kita memaca keputusan muktamar Muhammadiyah ke 46 tahun 2010 di Yogyakarta, sikap keberpihakan kepada masyarakat miskin secara organisatoris dan kelembagaan tergambar semakin kuat. Setidaknya terdapat 11 pasal program yang secara jelas dan eksplisit akan memberi perhatian pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan advokasi kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat.⁵⁵

MPM PP Muhammadiyah dibentuk setelah Muktamar Muhammadiyah ke-45. MPM mempunyai dua pekerjaan besar. Pertama, menata konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Kedua, melakukan sosialisasi kepada kalangan internal Muhammadiyah bahwa pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum miskin merupakan kewajiban keagamaan. Pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya ditujukan kepada warga Muhammadiyah

saja atau umat Islam semata, tetapi ditujukan untuk seluruh rakyat tanpa melihat suku dan agama. Kemudian periode 2010-2015, misi MPM memberikan prioritas kepada empat hal. Yaitu pertama, *massifikasi* program pemberdayaan masyarakat. Kedua, memberi perhatian yang lebih serius kepada advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan akomodatif terhadap kehidupan rakyat miskin yang terpinggirkan. Ketiga, memberi perhatian serius kepada kaum buruh, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Keempat, memberi perhatian serius kepada kaum difabel melalui berbagai aktivitas pemberdayaan.⁵⁶

Di tangan yang tepat MPM dirintis dan dipelopori oleh kedua tokoh yaitu almarhum Dr. Moeslim Abdurrahman dan almarhum Dr. Said Tuhuleley, yang keduanya merupakan kekuatan operasional dari gagasan teologi al-Ma'un ala Ahmad Dahlan dan sekaligus peletak dasar-dasar gerakan pemberdayaan masyarakat. Said Tuhuleleylah yang berhasil secara gemilang melanjutkan, menyempurnakan, dan mengonkretkan langkah-langkah *avant garde* Moeslim Abdurrahman. Langkah-langkah keduanya yang sangat fenomenal berhasil mendorong ekspansi dan ekstensifikasi gerakan Muhammadiyah sehingga merambah dunia buruh, tani, dan nelayan, bidang-bidang yang selama ini berada di luar arus utama Muhammadiyah. Muhammadiyah yang di sepanjang satu abad pertama usianya lebih dikenal menekuni bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, di tangan Lamongan dan Putra Ambon itu mulai merambah dunia petani, buruh, dan nelayan.⁵⁷

Dilihat dari kemunculannya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) tergolong Majelis yang baru. Meskipun tergolong sebagai majelis yang relatif baru, beberapa contoh dan rintisan model pemberdayaan masyarakat sudah banyak dilakukan, terutama di kantong-kantong "kemiskinan" masyarakat yang mengalami ketidakberdayaan dan marginalisasi khususnya petani, nelayan tambak, pelaku industri rumah

⁵³ lihat Anggaran Rumah tangga Muhammadiyah Pasal 19 ayat 1 poin a.

⁵⁴ lihat Berita Resmi Muhammadiyah, BRM, No 1 tahun 2005, 67-68 dan 88.

⁵⁵ lihat BRM, 2010.

⁵⁶ Muthohharun Jinan, "Dakwah Pelayanan Muhammadiyah", dalam Abdul Mu'ti dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2016), 308.

⁵⁷ Hajriyanto Y. Thohari, "Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah" dalam Abdul Mu'ti dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan...*, 331.

tangga, kelompok buruh, difabel, dan kelompok miskin kota. Sejak 10 tahun terakhir melalui MPM Muhammadiyah mulai menggarap ranah pertanian, peternakan, dan perikanan. Di bawah pimpinan alm. DR (HC) Said Tuhulele (wafat 9 Juni 2015), MPM semakin berkibar dan siapa tahu akan menjadi arus utama ketiga dalam Muhammadiyah dalam beberapa tahun yang akan datang setelah pendidikan dan kesehatan.⁵⁸

Dalam menjelaskan cara kerja aktivitas pemberdayaan dari berbagai konteks, MPM mengacu pada pendekatan ekologi perkembangan manusia (*ecology of human development*) dan lingkungannya yang menyatakan bahwa intervensi sosial harus dapat menyentuh seluruh level relasi antar individu dan lingkungannya. Ruang lingkup/pendekatan pemberdayaan dan bidang garap majelis tersebut terdiri dari tiga tingkatan: *Pertama*, level makro (struktur sosial, sistem politik, ideologi, kebijakan pemerintah, lingkungan global), sistem yang akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan publik; *full participation of community*. *Kedua*, level meso (lingkungan dan komunitas; norma sosial, nilai-nilai, kultur), yaitu membantu lingkungan agar dapat mengakomodasi kebutuhan individu; *social networking*. *Ketiga*, level mikro (individual; sistem nilai, sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan), yaitu *self-awareness*; memfasilitasi pengembangan potensi individual dan memfasilitasi adaptasi diri terhadap lingkungan.⁵⁹

Berdasarkan relasi antar level tersebut, bidang garap yang akan diberdayakan oleh MPM adalah: *Pertama*, kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. *Kedua*, pengembangan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat (yang miskin dan termarjinalisasi). *Ketiga*, advokasi kebijakan terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik yang tidak akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas maupun komunitas-komunitas yang termarjinalisasi. *Keempat*, pengembangan pusat penanggulangan krisis (*recovery center*) di tingkat regional dan wilayah yang berfungsi sebagai respon cepat dan antisipasi terhadap problem-problem psikososial

⁵⁸ Ahmad Syafii Maarif, "Antara Penentu dan Pembantu" dalam Abdul Mu'ti dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan...*, 432.

⁵⁹ Laporan Pertanggung Jawaban Muktamar ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015, 410-411.

di masyarakat.⁶⁰

Peran MPM dalam pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator program pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah (termasuk ortom dan amal usaha) dalam berbagai skala dan variasi/konsentrasi kegiatan. MPM juga sebagai inspirator dan motivator bagi warga Muhammadiyah untuk mengembangkan jiwa prososial dan voluntarisme, juga sebagai mediator individu, lingkungan, dan sistem yang lebih luas.

Visi pengembangan MPM dalam Muktamar ke-46 dan ke-47 diarahkan untuk, "Meningkatnya kapasitas, daya saing, posisi tawar, dan intensitas pemberdayaan masyarakat berbasis misi Penolong Kesengsaraan 'Oemoem' (PKO) dan gerakan al-Ma'un menuju kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban". Adapun program-program yang bersifat pengembangan antara lain: 1) Mengaplikasikan konsep-konsep gerakan seperti Teologi/Fikih al-Ma'un dan model pemberdayaan masyarakat lainnya yang terpadu dengan sistem gerakan Muhammadiyah; 2) Mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom-up* dan partisipatif untuk komunitas buruh, tani, nelayan, dan kaum marginal di perkotaan maupun pedesaan; 3) Mengembangkan potensi sumberdaya manusia untuk pemberdayaan masyarakat disertai peningkatan kualitas pengelola, optimalisasi multimedia dan teknologi informasi, dan mobilisasi sumber dana dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat; 4) Meningkatkan kapasitas pengorganisasian dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai daya dukung yang dimiliki persyarikatan; 5) Meningkatkan jaringan hubungan dan kerjasama baik di lingkungan persyarikatan maupun lembaga-lembaga lain yang memiliki kepedulian pada pengembangan *civil society* atau masyarakat madani sejalan dengan prinsip gerakan Muhammadiyah; 6) Mengembangkan model-model pertanian, peternakan, dan perikanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir menuju pemberdayaan kelompok petani, nelayan, dan peternak yang kuat dan mandiri; 7) Meningkatkan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok miskin, buruh, dan kelompok *dhu'afa/mustadh'afin*

⁶⁰ *Ibid.*, 412.

lainnya untuk memiliki akses, usaha, dan kekuatan kemandirian; 8) Meningkatkan perhatian, kepedulian, dan advokasi kepada kelompok difabel untuk memperoleh hak-hak dasar dan kesejahteraan dalam kehidupannya; 9) Mengupayakan advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan tidak memihak kepada kaum miskin, *dhu'afa*, dan *mustadh'afin*; 10) Mengembangkan pusat penanganan krisis (*crisis center*) di pusat dan wilayah sebagai wahana penanggulangan krisis yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat miskin, *dhu'afa*, dan *mustadh'afin*; 11) Meningkatkan kapasitas keahlian, modal, produksi, dan distribusi usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha-usaha lainnya yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan tanggal 21-24 Juni 2012 di Kota Bandung yang berkaitan dengan bidang garap Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) adalah: "*Pengembangan model praksis gerakan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk komunitas petani, abang becak, buruh, nelayan dan kelompok dhu'afa lainnya yang memerlukan peningkatan dan diversifikasi dan model yang dikembangkan meliputi: 1) Menegakkan kedaulatan pangan; 2) Memberdayakan sektor informal; 3) Memberdayakan kaum buruh; dan 4) Memberdayakan kaum difabel*" (Tanfidz Tanwir). Keputusan Sidang Tanwir tersebut pada hakikatnya menjadi acuan program prioritas pada tahun selanjutnya. Seiring dengan amanah tersebut, kegiatan majelis harus berjalan secara simultan agar keberadaan dan eksistensi Majelis Pemberdayaan Masyarakat dapat segera dirasakan manfaatnya oleh umat. Namun demikian, menyadari banyaknya amanah yang diemban majelis, untuk memudahkan operasional kegiatan divisi pengembangan dalam majelis yang semula terdiri dari empat bagian dikembangkan menjadi lima divisi yaitu: Divisi Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Organisasi; Divisi Model Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kaum Marginal; Divisi Pengembangan Model Pertanian Terpadu; Divisi Advokasi Kebijakan; dan Divisi Pengembangan Kemitraan Strategis dan Publikasi. Di samping itu, pengurus juga dibantu oleh Tim Fasilitator.

Dalam Mukhtar ke-47 diagendakan dan diprogramkan secara khusus tentang "Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas" sebagai

wujud aktualisasi Gerakan Jamaah untuk dilaksanakan dan menjadi gerakan masif dalam pergerakan Muhammadiyah ke depan.⁶¹ Gerakan pencerahan juga bermakna sebagai gerakan pemberdayaan. Setelah melakukan pembebasan, Muhammadiyah harus melakukan tindak lanjut penguatan masyarakat. Upaya penguatan itu bisa dilihat dari bagaimana Muhammadiyah memberdayakan masyarakat sejak berdirinya sampai saat ini. Komitmen pemberdayaan mengalami penguatan dan institusionalisasi ketika Muhammadiyah mendirikan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).⁶² MPM adalah jawaban Muhammadiyah dalam merespons dan mengatasi persoalan hidup masyarakat, khususnya kemiskinan. Muhammadiyah melalui MPM langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan melakukan intervensi mengatasi persoalan hidup masyarakat, khususnya di akar rumput, miskin, dan marginal. Adapun praksis MPR selama ini antara lain:

1. Jihad Kedaulatan Rakyat

"Selama Rakyat Masih Menderita, Tidak Ada Kata Istirahat" begitulah slogan yang diwariskan oleh almarhum Said Thuhuleley yang begitu melekat di hati aktivis/penggerak Majelis Pemberdayaan Masyarakat. "Jihad Menegakkan Kedaulatan Rakyat", yang meliputi bidang garap sebagai berikut: *Pertama*, jihad menegakkan kedaulatan pangan, meliputi antara lain: mengembangkan model pertanian terpadu (*integrated farming*); mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) pertanian terpadu; mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. *Kedua*, jihad memberdayakan sektor informal, meliputi antara lain: Pendampingan pedagang asongan; pendampingan abang becak; pendampingan kaki lima; pendampingan berbagai sektor informal lainnya. *Ketiga*, jihad memberdayakan kaum buruh, meliputi antara lain: penguatan kapasitas buruh migran untuk mengembangkan usaha; pendampingan terhadap keluarga buruh migran di tanah air; dan pendampingan buruh gendong dan perosok.

⁶¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Model Dakwah...*, 25.

⁶² Bachtiar Dwi Kurniawan, "Kemiskinan dan Kepemimpinan Muhammadiyah", dalam Abdul Mu'ti dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2016), 312.

Keempat, “Jihad Advokasi Kebijakan Publik”, advokasi kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik yang tidak akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas maupun komunitas-komunitas yang termarginalisasi. Program kerja bidang garap ini diarahkan kepada dua hal, yang menjadi prioritas utama, yaitu: a. memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat miskin langsung kepada penentu kebijaksanaan/pengambil keputusan, dengan menggunakan pendekatan “*islah*”. Prinsipnya: rakyat miskin tidak dikorbankan, mengangkat isu-isu besar yang berhubungan dengan nasib rakyat banyak sehingga menjadi perbincangan khalayak. Program ini misalnya advokasi kebijakan publik yang merugikan rakyat, advokasi penyusunan APBN maupun APBD, dan Sekolah Aparatur Desa. *Kelima*, jihad memberdayakan kaum difabel, meliputi antara lain: penguatan kapasitas penyandang disabilitas, fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, dan advokasi aturan dan perundangan yang pro penyandang disabilitas.⁶³

Jenis program-program di atas menandai dinamika baru gerakan Muhammadiyah di abad kedua, yaitu mulai masuknya Muhammadiyah langsung ke akar rumput untuk bersama masyarakat berupaya menolong diri mereka sendiri. Inilah inti pemberdayaan masyarakat. Kalau selama ini Muhammadiyah terkesan sebagai gerakan elite kota maupun desa, maka dinamika menjelang usia satu abad memperlihatkan bahwa Muhammadiyah memilih juga ‘jalan sunyi’, masuk langsung ke desa untuk bersama masyarakat ‘melumuri tangan dengan lumpur’, atau bermandi keringat di gang-gang sempit untuk bersama masyarakat miskin berbuat sesuatu bagi upaya menolong diri sendiri. Beragam tanggapan memang muncul dari kalangan persyarikatan sendiri. Ada yang memberi komentar, “Muhammadiyah kok ngurus petani”. Ini perkara jalan berpikir. Sudah lama di kalangan Muhammadiyah berkembang cara berpikir bahwa Muhammadiyah itu ya sekolah, ya rumah sakit, ya panti asuhan. Karena itu, dinamika menjelang satu abad usia Muhammadiyah ini memerlukan suatu upaya serius juga untuk mengembangkan jalan berpikir

⁶³ Laporan Pertanggung Jawaban Muktamar ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015, 410.

sedemikian sehingga persoalan dasar rakyat juga menjadi bagian yang dipikirkan Muhammadiyah.⁶⁴

2. Merengkuh dan Memberdayakan PSK

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan merupakan representasi Muhammadiyah di tingkat kecamatan. Secara geografis berada di kompleks lokalisasi PSK yaitu di Bangunsari-Dupak dan Tambak Asri-Morokrembangan Surabaya. PCM Krembangan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi terhadap mantan PSK yang dialamatkan sebagai kaum lemah (baik secara iman maupun modal). Pemberdayaan ekonomi tersebut ditujukan pada pengembangan tiga ranah yakni sosial, ekonomi dan religiusitas (perilaku keberagamaan) dengan pendekatan dari sisi ekonomi melalui pemberian modal usaha. PCM Krembangan hidup dan berkembang di lingkungan lokalisasi. Di satu sisi PSK menjadi beban karena merupakan bagian dari patologi sosial, di sisi lain mereka merupakan peluang dan ladang bagi dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebelum ada isu dan upaya Pemkot Surabaya tentang penutupan lokalisasi di daerah Bangunsari maupun Tambak Asri, program kerja Muhammadiyah telah melibatkan para PSK, misalnya pengajian rutin bersama ibu-ibu Aisyiyah. Melalui pengajian ini, PCM melakukan pendekatan baik kepada Bapak/Ibu geromo/mucikari agar menyekolahkan anak-anak mereka di SD Muhammadiyah 11 Bangunsari, maupun aktif di AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) melalui beberapa ortom Muhammadiyah di lingkungan PCM Krembangan, baik Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Tidak kalah penting PCM memberikan santunan rutin maupun pembinaan keterampilan bagi PSK dengan merangkul NU, LSM-LSM terkait, dan pemerintah.⁶⁵

Ada dua pembagian daerah binaan PCM Krembangan yaitu Bangunsari dan Tambak Asri. Kedua daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi kondisi ekonomi rata-rata penduduknya, kondisi sosio-kultural maupun kondisi sosio-religiusitasnya. Spirit awal dakwah PCM Krembangan di dua daerah ini adalah untuk

⁶⁴ Said Tuhuleley, “Gerakan Dakwah Muhammadiyah...”

⁶⁵ Arin Setiyowati, “Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Surabaya”.

mengubah kampung prostitusi menjadi kampung santri. Karenanya tanpa perlu menunggu pemerintah untuk melakukan pemihakan pada para PSK sebagai bagian dari kaum *mustadh'afin*, PCM Krembangan melalui beragam program dan kegiatan selalu mengikutsertakan para PSK, baik secara langsung maupun tidak langsung. PCM mengembangkan program binaan, baik untuk PSK aktif maupun mantan PSK. Berdasar data arsip PCM Krembangan, PSK binaan Tahap 1 berjumlah 25 orang (pembinaan di masjid At-Taqwa Bangunsari), sementara PSK binaan tahap 2 sejumlah 48 orang (pembinaan di SD Muhammadiyah 11), jadi total ada sekitar 73 PSK yang dibina sekaligus diverifikasi kesiapan dan kelayakan mereka untuk berusaha (berwiraswasta). Dari 73 PSK maupun mantan PSK yang dianggap layak diberikan modal dan dibuatkan usaha. Setelah berjalan selama beberapa waktu dan seleksi alam, akhirnya 40 orang dari mereka dapat bertahan dan terus melanjutkan usahanya. Pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin, shalat tarawih berjamaah, pondok ramadhan WTS, bantuan mukena dan sembako, pembinaan kewirausahaan, pelatihan memasak, konseling (curhat bareng), pembinaan HIV, usaha warung kopi, usaha warung makan, usaha gorengan dan es degan, dan usaha sayur keliling.⁶⁶

Setelah melalui proses seleksi, penelusuran minat dan bakat usaha, pelatihan dan pemberian modal, akhirnya dari 40 orang tersebut, seiring berjalannya waktu berkurang menjadi 35 orang. Dari 35 PSK/ mantan PSK sebelum penutupan mengalami seleksi alam terutama dengan adanya kebijakan penutupan lokalisasi secara resmi oleh Pemkot Surabaya. Akhirnya pasca penutupan lokalisasi, hanya 17 mantan PSK yang dibina oleh PCM Krembangan melalui usaha-usaha kecil di lingkungan Bangunsari maupun Tambak Asri. Dari 17 mantan PSK ini ada yang mendapat bantuan modal penuh dan ada juga yang hanya mendapatkan bantuan tambahan modal. Jumlah 17 orang ini semakin hari semakin berkurang dengan berbagai alasan, diantaranya pulang kampung, menikah, dan melarikan diri.⁶⁷ Dalam hal urgensi upaya pertolongan ekonomi perlu

digaris bawahi, mengingat bahwa rerata umur mantan PSK yang menjadi mitra binaan PCM Krembangan adalah ibu-ibu yang memiliki beban anak dan keluarga di desa yang setiap bulannya menunggu kiriman uang dari mereka. Peluang ini yang disambut oleh PCM Krembangan melalui program pemberdayaan dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi.

3. Revolusi Pertanian Terpadu

Sektor pertanian merupakan wilayah tajdid baru Muhammadiyah di abad kedua. Melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammadiyah mulai fokus memberdayakan petani dan pertanian yang selama ini terabaikan. Ada beberapa contoh yang sudah berhasil dilakukan oleh MPM. *Pertama*, Sawangan merupakan kecamatan yang berada di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Sebagian penduduknya bermata pencaharian petani, juga sebagai buruh tambang pasir dan batu di sungai-sungai kecamatan ini, seperti Kali Putih dan Kali Pabelan. Kemiskinan menjadi bagian penting wajah pedesaan, belum lagi tingkat pendidikan dan buta huruf. Di Cabang Sawangan, terdapat 12 desa. Tetapi Muhammadiyah baru 6 ranting. Hampir semua ranting tidak aktif dikarenakan warga sibuk dengan aktivitas mata pencaharian untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga. Momentum pengembangan cabang dan ranting bermula dari Nur Ardiyanto, aktivis Muhammadiyah di Desa Piyungan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Magelang untuk mengembangkan usaha pertanian miliknya seluas 2 ha. Kebetulan saat itu MPM PP Muhammadiyah sedang mengadakan Diklat Pertanian Terpadu ke-3 di Yogyakarta, Maret 2011. Setelah Diklat Ardiyanto hampir setiap hari menemui Konsultan Bidang Pertanian MPM PP Muhammadiyah, Ir. Syafii Latuconsina di Yogyakarta. Melihat keseriusan MPM PPM membuat Ardiyanto sebagai inti jamaah tani di Sawangan menjadi fasilitator lapangan. Maka dibentuklah Kelompok Tani "Surya Gemilang" yang didukung PCM Sawangan. Kelompok ini pesat, sehingga menjadi 7 kelompok Surya Gemilang se-Kecamatan. MPM kemudian mengadakan pelatihan pertanian se-kecamatan Sawangan. Bersama dengan itu Lazismu membantu menyediakan kambing jenis Merino sebanyak 13 ekor sebagai "pabrik penghasil utama bahan baku pupuk kocor yang selama ini menjadi andalan MPM. Maka dibuatlah

⁶⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Best Practice Program Muhammadiyah*, 73-83.

⁶⁷ Arin Setiyowati, "Efektivitas Pemberdayaan.

Pusdiklat Pertanian Terpadu Unit-3 melengkapi Unit-1 di Makassar dan Unit-2 di Kayutanam, Sumatra Barat.⁶⁸

Kedua, berbeda dengan Sawangan yang memulai gerakannya setelah Diklat, kegiatan ini justru dimulai sejak erupsi merapi oleh MDMC. Tepatnya di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Pasca darurat PCM Selo meminta MPM PPM agar membantu *recovery* di bidang pertanian. Lalu diadakan Pelatihan Pertanian Terpadu setengah hari, kemudian diberi pendampingan rutin dengan membentuk kelompok tani "Surya Madani". Lazismu kemudian menyumbang 23 Domba Melino. Usaha "Surya Madani" luar biasa, kambing 23 ekor telah menjadi 120 ekor. Keuntungannya tidak hanya dari kambing tetapi juga kotorannya. Saat ini, PNPM Boyolali menetapkan Desa Jrasah sebagai Desa Belajar Pertanian Organik Terpadu.⁶⁹

Ketiga, di tengah kerisauan akibat turunnya produksi pertanian, MPM PP Muhammadiyah mampu melakukan revolusi pertanian di Banjarnegara. Banjarnegara merupakan salah satu *pilot project* MPM PP Muhammadiyah di Jawa Tengah, sehingga di kabupaten ini Muhammadiyah telah membantu terjadinya peningkatan produksi pertanian melalui cara "bagaimana *cost of production* dapat diturunkan sampai 50%. Meskipun luas wilayah 1.064,52 km persegi yang umumnya berstruktur bebatuan, hanya 18,17% tanah sawah, dan dari luas itu hanya 6,32% yang berpengairan teknis, 5,29% berpengairan sederhana, 5,65% sawah tadah, dan 0,70% berpengairan non-teknis, sektor pertanian di Banjarnegara menjadi sektor penting. Namun ada kecenderungan produksi pertanian terus menurun hasilnya. Untuk mengembalikan kesuburan tanah, petani diajak membuat sendiri Pupuk Lengkap Kocoran (PLK) dengan memanfaatkan nanas masak yang diblender kemudian dicampur dengan (kotoran kambing) yang telah diolah. Sedangkan penanaman menggunakan sistem legawa, di mana setiap 3 baris diberi kelonggaran (kelegawaan) 30 cm. Tujuannya agar sinar matahari tidak masuk. Revolusi pertanian di Banjarnegara sudah diakui oleh Menteri Pertanian, sebagai harapan baru bagi

petani dan pertanian. Apalagi pendampingan MPM PPM menunjukkan hasil bagi tanaman kentang dan teh di Pengelengan, Bandung, juga berbagai jenis sayuran dan buah-buahan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa praksis pemberdayaan Muhammadiyah dibentuk oleh habitus Moeslim Abdurrahman, ditambah modal intelektualnya yaitu "Islam Transformatif" yang merupakan reinterpretasi teologi al-Ma'un KH. Ahmad Dahlan. Modal dan habitus ini bergerak di arena perjuangan yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan, yang kemudian melahirkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sebagai praksis pemberdayaan Muhammadiyah. Dalam proses pelebagaan pemikiran Moeslim Abdurrahman ini mengalami proses eksternalisasi yaitu proses kemunculan gagasan Islam Transformatif menjadi fenomena obyektif di Muhammadiyah maupun ruang publik. Akhirnya terinternalisasi dalam Muhammadiyah, sehingga melembaga menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat.[]

⁶⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Best Practice Program Muhammadiyah*, 55-57.

⁶⁹ *Ibid.*, 60.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Abdurrahman, Moeslim. *Kang Thowil dan Siti Marginal*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Abdurrahman, Moeslim. *Semarak Islam Semarak Demokrasi?* Jakarta: Pustaka, 1996.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Yang Memihak*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Abdurrahman, Moeslim. *Bersujud Di Baitullah: ibadah haji. mencari kesalehan hidup*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of The Judgment of Taste*. terj. Ricard Nice. UK: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1984.
- Chambers, R. "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?". dalam G. Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Cides, 1996).
- <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2018).
- Ife, J.W. *Community Development: Creating Community Alternatives. Vision, Analysis and Practice*. Longman. Australia, 1995.
- Jinan, Muthohharun. "Dakwah Pelayanan Muhammadiyah". dalam Abdul Mu'ti dkk. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2016).
- Kartasasmita, G. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1996.
- Kurniawan, Bachtiar Dwi. "Pemberdayaan Masyarakat: Jalan Dakwah Muhammadiyah di Akar Rumput" dalam *Pelajar Bergerak Menuju Indonesia Berkemajuan*. Jakarta: Al-Wasat, 2014.
- Kurniawan, Bachtiar Dwi. "Kemiskinan dan Kepemimpinan Muhammadiyah". dalam Abdul Mu'ti dkk. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah Press, 2016.
- Laporan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005. Disampaikan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 (Malang. 2005). 111.
- Laporan Majelis dan Lembaga serta Organisasi Otonom Pimpinan Pusat Muhammadiyah Disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2009.
- Laporan Pertanggung Jawaban Mukhtamar ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii. "Antara Penentu dan Pembantu" dalam Abdul Mu'ti dkk. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Mu'ti, Abdul. "Muhammadiyah Gerakan Civil Society yang Mandiri. Tidak Anti Pemerintah." *Media Maarif* Vol 4, no. 2 (2009).
- Mutthoharoh. "Teologi Islam Transformatif Di Era Kontemporer". *Penelitian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2013.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas*. Yogyakarta: PPM, 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Berita Resmi Muhammadiyah*. BRM. No 1 tahun 2005.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Best Practice Program Muhammadiyah*.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- Qodir, Zuly. "Kalibokong Theology And Moeslim Abdurrahman's Transformative Islamic Education" *Jurnal Iseedu* Volume. 1, no. 1 (2017) .
- Raharjo, Fauzan Budi. "Islam Transformatif Dalam Pandangan Moeslim Abdurrahman". *Penelitian Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN*

- Sunan Kalijaga, 2015.
- Riyanto, Waryani Fajar. Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Birografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...) *Person. Knowledge. and Institution*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Saputra, Sawaluddin Eka. "Institusionalisasi Gagasan Islam Transformatif dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Iseedu* Volume. 1, no. 1 (2017).
- Setiyowati, Arin. "Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krebangan Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Surabaya".
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Syahputra, Deni. "Dakwah Transformatif (Studi Pemikiran Moeslim Abdurrahman)". *Penelitian* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Thohari, Hajriyanto Y. "Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah" dalam Abdul Mu'ti dkk. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan* (Surakarta: Muhammadiyah Press).
- Webb, Jen., Schirato, Tony., and Danaher, Geof. *Understanding Bourdieu*. London: SAGE Ppublication, 2002.